

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 2,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan seLembatannya sebesar 1,67% (yoy). Inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,64% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas daging babi, minyak goreng, dan rokok kretek filter menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara itu, pada kelompok transportasi kenaikan tarif angkutan dalam kota dan angkutan udara juga menjadi pendorong laju inflasi.

Sementara, inflasi di Kabupaten Lembata mengikuti perkembangan inflasi di Kota IHK terdekat yaitu Kabupaten Sikka Kota Maumere. Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 1,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan seLembatannya sebesar 0,55% (yoy). Kenaikan harga minyak goreng, ikan tuna, dan rokok kretek filter menjadi faktor utama pendorong inflasi di Kota Maumere. Fenomena kenaikan harga minyak goreng yang terjadi secara nasional di triwulan I juga berdampak pada inflasi di Maumere. Ikan tuna juga menjadi komoditas pendorong inflasi karena produksinya rentan mengalami gejolak akibat faktor cuaca dan gelombang tinggi di laut. Sementara itu, kenaikan tarif CHT juga memengaruhi kenaikan harga rokok kretek filter di Maumere.

Di sisi lain, penurunan harga ikan selar, talas, dan daging ayam ras menjadi penahan laju inflasi di Maumere. Hasil tangkapan ikan selar oleh nelayan yang sedang baik menyebabkan harga ikan selar di Maumere mengalami penurunan. Sementara itu, harga daging ayam ras di Maumere turun akibat permintaan dari warung-warung maupun rumah makan yang mengalami penurunan.

Di Kabupaten Lembata sendiri, tercatat perkembangan inflasi yang tercermin melalui volatilitas harga barang kebutuhan pokok masih terjaga dan terkendali, permintaan terhadap barang komoditas pokok masih stabil dan berjalan normal. Risiko ke depan yang mungkin di hadapi oleh Kabupaten Lembata adalah risiko terhadap munculnya varian baru dari Covid-19, yang akan mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok dan mempengaruhi permintaan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya permintaan masyarakat, sehingga menyebabkan kondisi harga barang kebutuhan pokok akan terganggu.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah Timor yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
2. Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau asymmetric information antarpelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.
3. Distorsi struktur pasar. Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga
4. Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh daerah di Provinsi NTT menjadikan lahan di Provinsi NTT bersifat kering dan tandus,

sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktifitas pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kabupaten Lembata terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Dinas dan OPD terkait, stakeholders, maupun lembaga dan instansi vertikal lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah, Kabupaten Lembata telah memiliki peta jalan (roadmap) sebagai arah kebijakan pengendalian inflasi. Termasuk, guna menjaga stabilisasi inflasi di daerah, Kabupaten Lembata telah memiliki program unggulan yang bekerjasama dengan seluruh instansi, lembaga dan stakeholders terkait lainnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Lembata secara rutin setiap bulannya melaksanakan kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi TPID, serta melaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kabupaten Lembata setiap triwulannya serta melaksanakan tindak lanjut atas rapat HLM TPID yang telah dilakukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melaksanakan pemantauan harga komoditas bahan pokok
2. melaksanakan program sidak pasar dan pasar murah
3. Pembelian produk hortikultura petani
4. Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat melalui Program tanam Jagung Panen Ternak (TJPT)
5. Pembangunan pabrik pakan ternak dan penyediaan pakan ternak untuk mendukung stabilisasi produksi daging ayam ras, telur ayam, dan daging babi.
6. Perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian
7. untuk meningkatkan produktivitas UMKM
8. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, pelabuhan) antar kabupaten/ kota.
9. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub teknologi e- commerce Distributor.
10. Melakukan penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui: Fasilitas UMKM pangan binaan dgn e- commerce di level nasional maupun daerah
11. Melakukan pemetaan sumber dan ketersediaan pangan masyarakat di Provinsi NTT (Padi dan Jagung).
12. Optimalisasi TTIC sebagai pusat distribusi bahan pangan pokok yang didukung dengan .
13. Melaksanakan Program pengendalian inflasi berbasis masyarakat;
14. Publikasi harga data komoditas pokok secara periodik di media massa atau media lain yang mudah diakses masyarakat.
15. Pembentukan database surplus / defisit komoditas pangan strategis (Cabe dan Bawang Merah).
16. Melakukan pengumpulan Data Pengolahan Informasi Pasar (PIP) Komoditi Peternakan
17. Pelatihan warga dibidang teknologi, pertanian organik, dan usaha tani.

Pendampingan bagi kelompok tani dibidang penerapan pertanian organik berbasis teknologi dan manajerial kelembagaan.

19. Program lahan percontohan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dibimbing langsung oleh petugas penyuluh lapang (PPL) berbasis teknologi dan pertanian organik.
20. Pengembangan unit pengolahan pupuk dan pestisida organik.
21. pengembangan unit pengolahan pasca panen padi organik sehingga dapat meningkatkan nilai jual ke wilayah lain.
22. pengembangan koperasi unit desa (KUD).
23. kebijakan penerapan pertanian organik kepada masyarakat dan keikutsertaan menjadi anggota koperasi unit desa (KUD).
24. menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk meningkatkan kesempatan menembus pasar ke wilayah lain.